KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2023

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 113/051/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 69/051/HK/2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Bupati Nomor 69/051/HK/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Badung tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 69/051/HK/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
18. Keputusan Bupati Badung Nomor 69/051/HK/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Nomor 69/051/HK/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
   di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 113 /051/HK/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023.
DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023..... 6
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan..... 24
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan..... 46

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN.. 47
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023..... 47

BAB IV. PENUTUP..... 90

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 8

Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023. Kabupaten Badung..... 54

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 113/051/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top- down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung disusun dengan memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah lain yang terkait dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan, serta forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

o. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

p. Peraturan Bupati Badung Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

q. Keputusan Bupati Badung Nomor 69/051/HK/2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

a. Mendukung pencapaian rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan.

b. Mewujudkan pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui program kegiatan yang sesuai

1.4 Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan capaian atas berbagai program dan kegiatan selama kurun waktu 2021 –2026 sebagaimana telah dijabarkan di atas, bila dikaitkan dengan target kinerja pada akhir periode, maka capaian target dan realisasi dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TABEL 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target Kinerja Renja PD Tahun 2023	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun (Tahun 2023		Capaian target Renstra s/d Triwulan II Tahun (Tahun 2023)	
									Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9= 5+7	10=9/4
1	**2**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
02	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan pemerintahan**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		
02	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan**	**83,40 (A)**	**80,40 (A)**	**80,40 (A)**	**80,40 (A)**	**80,40 (A)**		
02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80	16	8	8	100	24	30,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20	4	3	3	100	7	35,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	4	4	100	6	60,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40	8	4	4	100	12	30,00

						laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	%
2	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan yang tepat waktu**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3750	750	750	750	100	750	20,00
						orang/bulan	orang/bulan	orang/bulan	orang/bulan	%	orang/bulan	%
2	**1**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaporan yang tepat waktu**							
02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	6	25	25	100	31	20,67
						0rang	orang	orang	orang	%	0rang	%
2	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100%**						
02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	1	12	12	100	13	86,67
						paket	paket	paket	paket	%	paket	%
02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	1	1	1	100	2	33,33
						paket	Paket	Paket	Paket	%	paket	%
02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	8	3	3	100	11	27,50
						laporan	Laporan	kali	kali	%	laporan	%
02	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633	633	1	1	100	634	100,16
						unit	unit	paket	paket	%		

02	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes**							
02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	12	12	100	24	40,00
						laporan	laporan	laporan	laporan	%	laporan	%
02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu**	**100**	**100**	100	100	**100**	**100**	**100**
02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	1	1	100	2	40,00
						paket	paket	paket	paket	%	paket	%
02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72	12	12	12	100	12	16,67
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	30	13	13	100	43	59,72
						unit	unit	unit	unit	%	unit	unit
02	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar**	**98**	**98**	98	98	100	**98**	100,00
						%	**%**	%	%	%	**%**	**%**

02	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar**	**100**	**100**	100	100	100	**100**	**100**
						%	**%**	%	%	%	**%**	**%**
02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	1	1	1	100	2	30,00
						Paket	Paket	paket	paket	%	unit	%
02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1110	185	1	1	100	186	16,76
						unit	unit	paket	paket	%	unit	%
02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu	925	185	1	1	100	186	20,11
						unit	unit	paket	paket	%	unit	%
02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	6	1	1	1	100	2	36,67
						paket	paket	paket	paket	%	paket	%
02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	195	39	1	1	100	40	20,51
						paket	paket	paket	paket	%	paket	%
02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198	198	12	12	100	210	106,06
						unit	unit	bulan	bulan	%	unit	%
02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP,Makanan dan Minuman ke Puskesmas seta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	13	13	13	13	100	26	200,00
						pusk	pusk	pusk	pusk	%	pusk	%
02	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%

02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						orang	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						orang	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%

02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	%	orang	%
02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standa	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	13	13	13	13	100	13	100,00
						Pusk	Pusk	Pusk	Pusk	%	Pusk	%
02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	13	13	13	13	100	13	100,00
						Pusk	Pusk	Pusk	Pusk	%	Pusk	%
02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	288	52	52	52	100	104	36,11
						Minggu	Minggu	Minggu	Minggu	%	Minggu	%

02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	13	13	13	13	100	13	100,00
						Pusk	Pusk	Pusk	Pusk	%	Pusk	%
02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	72	12	12	12	100	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12	12	12	12	100	24	200,00
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	12	12	100	24	200,00
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	12	12	12	100	24	200,00
						bulan	bulan	bulan	bulan	%	bulan	%
02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	72	12	12	12	12	24	33,33
						bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	bulan	%
02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	140	28	80	80	100	108	77,14
						paket	paket	paket	paket	%	paket	%
02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10	2	12	12	100	14	140,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13	13	13	13	100	13	100,00
						Pusk	Pusk	Pusk	Pusk	%	Pusk	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	12	12

						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
				Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	72	12	12	12	100	24	33,33
						Bulan	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13	13	13	-	100	13	100,00
						unit	unit	Puskesmas	Puskesmas	%	unit	%

02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tida Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	72	12	12	12	100	24	33,33
						laporan	laporan	laporan	laporan	%	laporan	%
02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	260	52	12	12	100	64	24,62
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	140	28	12	12	100	40	28,57
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	660	132	12	12	100	144	21,82
						dokumen	dokumen	bulan	bulan	%	dokumen	%
02	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13	13	13	13	100	13	100,00
						unit	unit	unit	unit	%	unit	%
02	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina**							
02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	11500	2.300	2.300	2.301	100	4.601	40,01
						SIP/SIK	SIP/SIK	SIP/SIK	SIP/SIK	%	SIP/SIK	%

02	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota**	**Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	125	25	10	10	100	35	28,00
						orang	orang	orang	orang	%	orang	%
02	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150	30	110	110	100	140	93,33
						orang	orang	0rang	0rang	%	orang	%
02	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1350	270	118	118	100	388	218
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	dokumen
02	04	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optokal, Usaha mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	0	0	60	60	100	60	#DIV/0!

					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
								sarana	sarana	%	sarana	%
02	**04**	**2.03**		**Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice**	**70**	**70**					
02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	420	70	174	174	100	244	58,10
						P-IRT	P-IRT	P-IRT	P-IRT	%	P-IRT	P-IRT
02	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5	1	1	1	100	1	20,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	**04**	**2.05**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

02	**04**	**2.05**	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	600	100	100	100	100	100	16,67
02	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat**	**15**	**3**	3	3	%	6	40
						dokumen	**dokumen**	dokumen	dokumen	100	**dokumen**	%
										%		
02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	150	30	6	6	100	36	24,00
						dokumen	dokumen	dokumen	dokumen	%	dokumen	%
02	**05**	**2.02**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;**	**100%**	**100%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
02	**05**	**2.02**	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	65	13	13	13	100	13	20,00
						dokumen	dokumen			%	dokumen	%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2021-2026. Adapun rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung untuk pelaksanakan Program dan kegiatan di perubahan Renja Kerja Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 966.190.192.082 dengan rencian Dinas Kesehatan melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.570.268.513.672 , RSU Mangusada melaksanakan 2 (dua) Program, 5 (kegiatan) dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 371.610.192.428 sedangkan Puskesmas hanya melaksanakan 1 (satu) Program, 1(satu) kegatan dan 1 (satu) sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.311.485.983, Adapun sumber dana dari Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung dan dana Transfer Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCAT, DID, DBH, BKK sedangkan Operasional Pelayanan Rumah Sakit bersumber dari Pendapatan Rumah Sakit dan Operasional Pelayanan Puskesmas Bersumber dari Pendapatan Puskesmas. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. DINAS KESEHATAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

a. DED Pembangunan Puskesmas

b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

c. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

d. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

e. Pengadaan Obat, Vaksin

f. Pengadaan Bahan Habis Pakai

g. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
q. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
s. Pengelolaan Surveilans
t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
u. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
v. Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
w. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
x. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
y. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
z. Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat
aa. Operasional Pelayanan Puskesmas
bb. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
cc. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
dd. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
ee. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
ff. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis
gg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)

hh. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3.1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

3.3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

4.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)

4.3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi

4.4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

a. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

5.1. Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

B. RSUD MANGUSADA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Mebel

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
d. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
e. Pengadaan Obat, Vaksin

2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
b. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

C. PUSKESMAS

1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota

a. Operasional Pelayanan Puskesmas

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun melalui proses Evaluasi pada rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2023. Perubahan Renja 2023 dapat dijadikan acuan Dinas Kesehatan pada sisa waktu pelaksanaan tahun 2023. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing masing bidang pada Tahun 2023 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Badung, keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Mangupura, September 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,

dr. MADE PADMA PUSPITA,SP.PD.
PEMBINA
NIP . 19810909 200902 1 004

BUPATI BADUNG,